



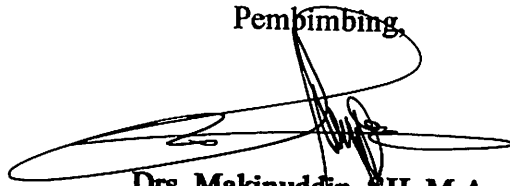


## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**Skripsi yang ditulis Oleh Moh. Thobib Dzikrul Hasan ini telah diperiksa dan disetujui dimunaqasahkan.**

**Suarabaya, 19 Januari 2011**

**Pembimbing,**



**Drs. Makinuddin, SH, M.Ag**  
**NIP.195711101996031001**











B. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Putusan Gugatan Rekopensi mengenai Gugatan Nafkah Batin Istri kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) Dalam Perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj .....	63
BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN.....	75
A. Analisis Dasar Pertimbang Hakim Pengadilan Agama Lumajang Dalam Putusan Penolakan Gugatan Rekopensi Yang diajukan Isteri Atas Nafkah Batin Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj .....	75
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Gugatan Rekopensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Istri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj .....	78
BAB V PENUTUP .....	84
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85

**DAFATAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Para ulama dalam fikih klasiknya memiliki perbedaan pendapat ketika membicarakan persoalan hak dan kewajiban suami-isteri, khususnya berkenaan dengan hubungan biologis suami isteri. Pendapat yang populer pada umumnya menempatkan hubungan biologis atau seks sebagai hak suami. Dan pendapat dimana suami yang berhak dalam masalah hubungan seks dinyatakan pada akad pernikahan dimana pihak lelaki yang meminta pihak wanita menjadi isterinya, pendapat ini dipelopori dari Madzhab Syafi'i. Jadi artinya ketika suami tidak berkeinginan untuk menyetubuhi isterinya, isteri tidak berhak untuk menuntut suami.<sup>1</sup>

Pendapat yang menyatakan isteri tidak memiliki hak dalam hal bersetubuh bukan berarti mentolerir suami mengabaikan begitu saja kehendak seksual isterinya. Andaikata seorang isteri yang tidak disetubuhi oleh suaminya bisa membuatnya jatuh pada perbuatan yang terlarang, maka di saat itu suami secara agama wajib memenuhi kebutuhan seksual isterinya. Ketidakpedulian suami terhadap kehendak isterinya adalah suatu tindakan yang bisa menimbulkan

---

<sup>1</sup> Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzahib al Arba'ah, Juz 4* ( Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969)h. 241







suaminya cerai, karena menganggap bahwa isterinya telah *nasyiah* (durhaka) tetapi isteri tersebut tidak serta merta menerima keputusan yang diambil suaminya karena tidak merasa bahwa dirinya durhaka kepada suaminya, suami menganggap bahwa isterinya melampaui wewenangnya, tetapi tindakan melampaui isteri tersebut mempunyai beberapa alasan mengapa melakukan tindakan *nasyiah* tersebut kepada suaminya itu, isteri mempunyai alasan bahwa sebelum dia bertindak seperti apa yang di anggap suaminya *nasyiah* ,suami terlebih dahulu memberi efek negatif tindakan kepadanya (suami) alasannya yaitu suami berselingkuh dengan wanita lain.

Dalam permasalahan ini kasus cerai talak, dimana suami menggugat isterinya terlebih dahulu. Isteri menerima gugatan cerai talak dari suaminya tetapi isteri sebelum putusan cerai diputuskan oleh hakim, isteri tersebut menggugat balik (Rekonpensi) suaminya dengan tuntutan Madliyah (nafkah terhutang) yaitu salah satu poin yang jarang diperkarakan dari kebanyakan perkara cerai, tuntutan nafkah batin (seks) dengan disertakan besar kopensasinya.

Tetapi pada waktu perkara (tuntutan nafkah batin) digulirkan, perangkat hukum yang dimiliki hakim belum ada. Ketika aturan perundang-undangan belum satupun mengatur berkenaan dengan permasalahan itu, maka bagaimana hakim tersebut mengambil kebijaksanaan.













dikabulkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro. Dengan alasan pokok, yaitu bahwa nafkah batin adalah kewajiban suami. Secara otomatis isteri akan dirugikan jika kewajiban suami tidak dipenuhi. Yang dalam hal ini hakim berpedoman pada kitab *al-Bajuri juz 2*. Namun hal ini bertentangan dengan pendapat Imam Malik yang didukung oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, diterangkan jika suami tidak melakukan kewajiban, maka isteri hanya diberikan pilihan antara cerai atau tetap melanjutkan rumah tangganya. Dan tidak ada keterangan tentang hak isteri untuk menuntut ganti-rugi untuk nafkah batin.

Dalam skripsi yang berjudul "Gugatan Rekonpensi Mengenai Tuntutan Nafkah Batin Isteri Kepada Suaminya Pada Masa Berpisah (Madliyah) Dalam Perkara Cerai Talak (Studi Kasus di PA Lumajang Nomor: 1715/Pdt. G/PA. Lmj). Dalam judul ini menggunakan penelitian studi putusan sehingga berbeda dengan metode penelitian pertama yang merupakan penelitian literer murni. Metode penelitian penulis pakai juga tidak sama dengan tulisan kedua dan ketiga yaitu studi kasus menurut penulis tulisan pertama dan kedua analisis datan merupakan hasil dari satu perspektif saja tapi dari beberapa perspektif. tetapi dalam penulisan penulis pakai menggunakan pendekatan kasus (analisisnya dari satu persepektif yaitu hukum) dengan sifat metode penelitian deskriptif analitis melalui pola deduktif.

Dalam perkara ini hakim mempunyai keputusan pertimbangan tersendiri, dalam penelitian hakim tidak mengabulkan tuntutan kopensasi materuil terhadap















Bab kedua, menguraikan tentang kajian teori, hak dan kewajiban suami Isteri menurut pandangan hukum islam, yang terdiri dari sub bab yang menerangkan hak dan kewajiban suami isteri menurut fikih, hak dan kewajiban suami isteri menurut perundang-undangan dan pelanggaran atas hak dan kewajiban suami isteri.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yaitu data Pengadilan Agama Lumajang mengenai gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya dalam bentuk materiil pada masa berpisah (Madliyah) dalam perkara cerai talak Nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj dan dasar hukum pertimbangan hakim pengadilan Agama Lumajang mengenai perkara tersebut .

Bab keempat, hasil penelitian, yang berisi analisis dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Lumajang dalam putusan penolakan gugatan rekonsensi yang diajukan isteri atas nafkah batin kepada suaminya pada masa berpisah (madliyah) dalam perkara cerai talak dan tinjauan hukum Islam terhadap gugatan rekonsensi mengenai tuntutan nafkah batin isteri kepada suaminya pada masa berpisah (Madliyah) dalam perkara talak nomor : 1715/Pdt.G/2006/PA. Lmj.

Bab kelima, berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari jawaban pokok masalah yang dibahas dan saran-saran yang diperlukan.















bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual isteri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap isterinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan nafkah dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin. Yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.<sup>7</sup>

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, hanafi, Shafi'i, dan Hambal sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal.<sup>8</sup>

Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 233 disebutkan:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ ...

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 165

<sup>8</sup> Abdur Rohman Al Jaziri, *Kitab Fiqh al madzhib al Arba'ah, Juz 4* ( Mesir : Al Maktabah Al Tijariyyah Al Kubro, 1969)h. 553







tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada isterinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 1/2 Nafkah tersebut mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud. Wajib diberikan kepada isteri yang tidak nusyuz selama suami ada dan merdeka.

#### 4) Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap isterinya jika pertama isteri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpuli oleh suami, kedua, isteri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh Memberikan suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu, disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Bila isteri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagi















*Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).”*

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.

Memelihara kehormatan diri dan menjaga harta Suami Hal ini dapat diwujudkan dengan sikap istri untuk tidak keluar rumahnya terutama jika suaminya tidak ada di rumah, tidak menerima tamu yang tidak disukai suami, tidak memberi harta atau shadaqah tanpa seizin suami, berlaku baik terhadap keluarga suami, menjaga rahasia Suami<sup>19</sup> sebagaimana Sabda Nabi, yang Artinya :

*“Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a. : nabi SAW pernah bersabda. “seseorang perempuan tidak boleh berpuasa saat suaminya bersamanya, kecuali dengan izin suaminya . dan seorang isteri tidak boleh mengizinkan siapa pun masuk ke rumah suaminya. Dan apapun yang ia keluarkan dari harta suaminya. Ia (suaminya) akan memperoleh ½ pahalanya.”<sup>20</sup>*

- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.<sup>21</sup>

c. Hak bersama suami isteri

- 1) Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya.

<sup>19</sup> Fazl Ahmed, *Pedoman perkawinan dalam islam*. (Jakarta : Darul Ulum Pers, 1994)h. 29

<sup>20</sup> Labib Mz dan Muh tadin, *Kumpulan Hadits Pilihan Shahih Bukhari*,(Surabaya : Tiga Dua, 1993) h.190

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) hal. 162-163











- (a) Nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri
- (b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
- (c) Biaya pendidikan anak
- (5) Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari isterinya.
- (6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.
- (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri nusyuz.<sup>26</sup>

Tentang kewajiban suami untuk menyediakan tempat kediaman,

kompilasi mengaturnya tersendiri dalam pasal 81 sebagai berikut :

- (1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah
- (2) Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah wafat.
- (3) Tempat kediaman disediakan untuk melindungi isteri dan anak-anaknya dari gangguan pihak lain, sehingga mereka merasa aman dan tentram, tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur alat-alat rumah tangga.
- (4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuan serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya.

#### b. Kewajiban isteri

Adapun kewajiban isteri terhadap suami yang secara garis besar terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam diatur secara lebih rinci dalam pasal 83 dan 84.

---

<sup>26</sup>Depag RI, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan..., (Jakarta : tt, 2004) h.159













yang dikemukakan oleh Ibn Hazm tersebut tersirat bahwa apa yang dikemukakannya di atas adalah batas minimal. Artinya kewajiban suami untuk menggauli isterinya minimal satu kali dalam tiap kali suci.<sup>33</sup>

Berkaitan dengan permasalahan ini Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kewajiban untuk menyetubuhi isteri tersebut minimal satu kali dalam empat bulan. Ahmad bin Hanbal mengemukakan bahwa jika suami meninggalkan isterinya, kemudian tanpa ada sesuatu hal yang menghalanginya dia tidak kembali, maka hanya ditolerir selama enam bulan, dan tidak diizinkan lebih dari itu kecuali atas persetujuan dan kerelaan isteri. Jika dia belum juga kembali dalam waktu enam bulan tersebut maka pengadilan dibolehkan untuk menceraikan antara keduanya.

Berkenaan dengan hal ini al-Ghazali berpendapat bahwa suami wajib untuk mendatangi isterinya setidaknya sekali dalam empat hari. Pendapatnya ini berdasarkan logika bahwa dalam Islam dibolehkan poligami dengan batas maksimal empat orang. Sekali pun demikian al-Ghazali berpendapat akan lebih baik jika hubungan seksual tersebut dilakukan lebih dari sekali, atau kurang dari itu sesuai dengan kebutuhan isteri dalam memenuhi keinginan seksnya, karena memelihara kebutuhannya tersebut wajib bagi suami.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998) hal. 416

<sup>34</sup> *Ibid*, Hal. 417





- 2) Apabila suami isteri tinggal dirumah kepunyaan isteri dengan izin isteri, kemudian pada suatu waktu isteri mengusir (melarang) suaminya masuk rumah itu, dan bukan karena minta pindah ke rumah yang disediakan suami.
- 3) Umpamanya isteri menetap di tempat yang disediakan oleh perusahaannya, sedangkan suami minta supaya menetap di rumah yang disediakan, tetapi isteri berkeberatan dengan tidak ada alasan yang pantas.
- 4) Apabila isteri bepergian dengan tidak beserta suami atau mahramnya, walaupun perjalanan itu wajib, seperti pergi haji, karena perjalanan perempuan yang tidak beserta suami atau mahram terhitung maksiat.<sup>38</sup>

*Nusyuznya* isteri para ulama sepakat bahwa gugurlah kewajiban suami memberi nafkah karena nafkah imbalan dari pada *jima'* (bersetubuh), tidak berhak mendapat nafkah, karena mengutamakan *wathi* dibalas dengan *wathi* karena nafkah merupakan imbalan bersenang-senang maka tidak ada nafkah bagi isteri yang *nusyuz*.<sup>39</sup>

Tetapi menurut madzhab Zahiri, Ibnu Hazm hukuman isteri yang *nusyuz* hanya dipukul dan dipisah dari tempat tidur. Sebagaimana dasar

<sup>38</sup> Sulaiaman Rasyid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994)h. 398

<sup>39</sup> Wahbah Al Zuhaili, *Al-Fiqh al Islām wa Adillatuh*, (Kairo Mesir : Dar al Fikr, 1989)h. 736



non materi diantaranya *mu'asyarah bi al ma'ruf* atau mengauli isterinya secara baik.<sup>42</sup>

Di dalam tafsir Al Azhar, tentang *kenusyuzan* suami : “bahwa tidak senang atau sudah bosan atau telah benci kepada isterinya. Hal ini biasa kejadian pada orang yang beristeri lebih dari satu atau telah jatuh kepada perempuan lain.<sup>43</sup>

Berikut adalah ayat yang mengindikasikan bahwa suami juga dapat berbuat *nusyuz* yaitu Q.S an-Nisā’ : 128 yang berbunyi berikut :

وَأَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا  
صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “*dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”*.

Berkenaan dengan masalah *nusyuznya* seorang suami , dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa seorang perempuan menemui Umar bin Khatthab, dia mengadakan nasibnya karena tidak pernah lagi digauli oleh suaminya karena suaminya hanya menghabiskan waktunya untuk

<sup>42</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2007) h.193

<sup>43</sup> Hamka, *Tafsir Al Azhar*,(Jakarta : Bulan Bintang, 1990)h. 303











- b. Rizki (bukan nama asli), umur 11 tahun.
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2004 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
  - a. Antara Pemohon dan Termohon selalu tidak ada kecocokan/ sulit untuk mencari titik temu, karena Termohon sering melampaui wewenang Pemohon sebagai seorang suami, tidak mendudukan suami sebagai kepala rumah tangga.
  - b. Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Termohon salah satunya dengan cara mengajak Termohon pindah ke Lumajang mendampingi tugas Pemohon namun Termohon menolak sehingga membuat jengkel.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut berlanjut hingga sekarang dan tidak dapat didamaikan walaupun telah diusahakan, karena Pemohon sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Juli tahun 2004, yang akibatnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang kerumah orang tua Pemohon sendiri dengan alamat sebagai mana tersebut diatas





- c. a dan b dihitung sejak Tergugat meninggalkan Penggugat sampai dengan putusan cerai menjadi tetap.
5. Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,-/bulan.
6. Bahwa selama perkawinan tersebut telah diperoleh harta bersama berupa ;
- a) Satu bidang tanah kurang lebih dua kaveling, luas 18,5 m x 20 m, di atasnya berdiri satu unit bangunan rumah tembok, lokasi Jl. Anggrek VIII/9 Situbondo.
  - b) Dua bidang tanah kurang lebih dua kaveling, luas 20 m x 20 m yang di atasnya berdiri satu unit rumah bangunan tembok dan satu unit bangunan walet, lokasi di Jl. Apel No. f/19, Perum Sukodono Lumajang.
  - c) Satu buah mobil Carry Adi Putro tahun 1990.
  - d) Sawah seluas kurang lebih satu Ha. Lokasi di Lumajang .
  - e) Dua buah sepeda motor merek Honda Supra, satu unit di Situbondo dan satu unit di Lumajang.
7. Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk memberikan satu buah Carry dan satu buah Sepeda motor.
8. Bahwa untuk menjamin masa depan anak-anak, Penggugat menuntut agar harta bersama selain tersebut pada poin no. 7 diberikan kepada kedua anaknya.

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik tertulis bertanggal 13 pebruari 2007 dan termohon juga



mengajukan duplik tertulis bertanggal 21 Pebruari 2007, yang untuk singkatnya menunjuk pada berita acara persidangan.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti berupa Foto Copy kutipan akta nikah Nomor : 399/151/VII/1986, tanggal 27 Agustus 1986, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lumajang Kab. Lumajang (bukti P-1).

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga menghadapkan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. edo (bukan nama asli) :
  - a. bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon.
  - b. bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak Termohon akan nikah dengan Pemohon.
  - c. sepengetahuan saksi, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun di Situbondo , mereka dikaruniai dua orang anak, awalnya rumah tangganya rukun, lalu sejak sekitar dua tahun yang lalu, mereka berpisah dan Pemohon pulang keLumajang.
  - d. bahwa saksi tidak mengetahui penyebabnya sehingga mereka berpisah.
2. Abas (bukan nama asli).
  - a. bahwa saksi adalah paman Pemohon.
  - b. bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak mereka menikah dengan Pemohon.



8. Foto copy Sertifikat hak milik Nomor 2135 atas nama Didik Akhmad mulyadi : (T-8).
9. Foto copy Surat Perjanjian Kredit pemilikan rumah antara PT Bank Tabungan Negara dan Do'ifah Wr. Bonali (T-9).
10. Foto copy Sertifikat hak Guna bangunan No. 87 atas nama Do'ifah Buk Bonali.
11. Foto copy kwitansi terima dari PT Bank Pembangunan Daerah Jatim Situbondo terbilang Rp. 7.000.000,- yang ditanda tangani oleh Didik Akhmad M tanggal 22 Mei 2002, dan kwitansi terima dari Didik akhmad M terbilang Rp. 190.000,- yang ditanda tangani tanggal 22 Mei 2002 (T-11).
12. Foto copy Akta Hibah antar Hajjah Siti Patemi dan Didik Akhmad mulyadi (T-12).
13. Foto copy Akta kelahiran atas nama Aditya Rusyadi (T-13).
14. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ardiansyah (T-14).

Bahwa disamping itu Tergugat juga menghadapkan dua orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Eny (bukan nama asli).
  - a. Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kaka kandung Termohon.
  - b. Bahwa pengetahuan saksi, selama menikah Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama yang berupa : tanah dan rumah dijalan





- a. Antara Pemohon dan selalu tidak ada kecocokkan/ sulit untuk mencari titik temu, karena Termohon sering melampaui wewenang Pemohon sebagai kepala rumah tangga.
- b. Pemohon telah berusaha memperbaiki rumah tangga bersama Termohon salah satunya dengan cara mengajak Termohon pindah ke Lumajang mendampingi tugas Pemohon namun Termohon menolak sehingga membuat pemohon jengkel.
- c. Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, akhirnya terjadi hidup pisah tempat tinggal yang hingga kini berlangsung selama dua tahun empat bulan.

Menimbang: bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon memberikan jawaban dengan kwalikasi, artinya Termohon membenarkan bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangganya dilanda perselisihan dan pertengkaran. Bahkan telah terjadi hidup pisah tempat tinggal, akan tetapi yang menjadi penyebabnya bukan karena Termohon melampaui wewenang Pemohon dan tidak mau pindah ke Lumajang, tetapi karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Aini Ayu, dan perselingkuhan tersebut berlanjut hingga Pemohon pindah ke Lumajang.

Menimbang: bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut, Pemohon memajukan surat bukti p-1 dan dua orang saksi, masing –masing, Edo dan Abas, sedang untuk mempertahankan dalil-dalilnya Termohon mengajukan Surat bukti T-1 s.d. T-3 dan dua orang saksi ,masing-masing Eny dan Fatma.

**Menimbang:** bahwa bukti P-1 (kutipan Akta Nikah) adalah fakta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan, oleh karenanya maka berdasar surat bukti tersebut, dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan termohon terikat oleh perkawinan yang sah.

**Menimbang:** bahwa saksi-saksi Pemohon Edo dan Abas telah memberikan keterangan yang bersesuaian dan sesuai pula dengan keterangan saksi Termohon Eny dan Fatma, bahwa sejak dua tahun yang lalu Pemohon telah pulang ke Lumajang dan berpisah dengan Termohon.

**Menimbang:** bahwa untuk bukti, T-2 dan T-3, karena berupa surat keterangan dibawah tangan, maka surat bukti tersebut dinyatakan tidak mempunyai kekuatan bukti, sedang bukti T-4, dikesampingkan karena irrelevant.

**Menimbang:** bahwa jika keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan pengakuan Termohon, ditemukan fakta :

- a. Bahwa akhir-akhir ini kerukunan rumah tangga antara pemohon dan Termohon telah dilanda perselisihan dan pertengkaran.
- b. Bahwa antara Pemohonan dan termohon telah berbeda pendapat tentang apa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut.
- c. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2004 hingga sekarang, pemohon pulang kerumah orang tuanya di Lumajang, dengan tidak memberikan nafkah wajib kepada Termohon.

Menimbang: bahwa tentang apa yang menjadi sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, para pihak telah berbeda pendapat. Pemohon menyatakan bahwa hal itu disebabkan karena Termohon melampaui wewenang Pemohon dan tidak mau pindah keLumajang, sedang menurut Termohon hal itu disebabkan karena Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama Aini Ayu.

Menimbang: bahwa dengan memperhatikan keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi, majelis menemukan petunjuk, bahwa yang menjadi sumber terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya berpisah adalah karena masing-masing pihak sudah tidak ada i'tikad untuk membangun dan memperbaiki rumah tangganya, sehingga tidak ada lagi rasa saling mempercayai, hormat menghormati dan kasih mengasihi, masing-masing telah bertindak tidak untuk kepentingan bersama.

Menimbang: bahwa disamping itu, siapapun yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi pengahalang untuk mengajukan perceraian, sepanjang terbukti adanya alasan perceraian, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang: bahwa disyariatkannya pernikahan oleh Islam, adalah mempunyai tujuan yang suci mulai sebagai ikatan yang kokoh kuat (mitsaqan Ghalidzan), dengan maksud untuk membentuk rumah tangga *sakinah* yang







Menimbang: bahwa didalam persidangan kedua anak tersebut telah menyatakan secara terpisah, bahwa jika terjadi perceraian antara ayah dan ibunya, maka keduanya memilih ikut ibunya.

Menimbang: bahwa pernyataan kedua anak tersebut untuk ikut ibunya, dipandang sebagai pernyataan yang tulus, karena keduanya sudah bisa berfikir secara jernih dan komprehensif, serta telah dipertimbangkan secara masak, sehingga sekalipun secara materiil bisa jadi mereka lebih senang ikut ayahnya karena ayahnya bekerja sebagai guru (PNS), namun kenyataannya mereka memilih tinggal bersama ibunya, bahkan selama ayah ibunya berpisah mereka telah nyata ikut ibunya. Oleh karenanya maka gugatan Penggugat tersebut dinyatakan dikabulkan.

Menimbang: bahwa disamping itu, penggugat juga menuntut nafkah yang telah ditinggalkan Tergugat sejak bulan Juli 2004 hingga sekarang (nafkah madliyah) ditambah nafkah iddah dan mut'ah.

Menimbang: bahwa dalam dalil gugatnya, Penggugat menerangkan, bahwa terhitung sejak bulan Juli 2004, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah mengirim nafkah wajib kepada Penggugat.

Menimbang: bahwa atas gugatan penggugat tersebut, Tergugat menyatakan membantah, bahwa ia masih memberi uang setiap bulan kepada anak-anaknya bahkan telah membelikan HP.





atau mahar yang sudah ditentukan kadar dan waktu pembayaran itu dapat dibenarkan dan dapat perkarakan.

Menimbang: Bapak Drs. Anwar, seandainya hakim berjihad memberikan ada ta'zir sebagaimana suami untuk dipaksa meladeni nafsu isteri, itupun suami tidak akan bereaksi karena pada dasarnya ada tekanan psikis pada keduanya (suami isteri). Tidak hanya organ seks suami tidak merespon tetapi suami (laki-laki) jika sudah ada tekanan psikis melihat wanita atau isteri yang dibenci tak akan ada ketertarikan untuk itu bahkan melihat seseorang yang dibenci membuat niat jahat muncul.

Menimbang: Drs. Anwar, masalah nafkah batin tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum tetapi juga dilihat dari unsur etika karena pernikahan tidak hanya mengikat secara perdata tetapi *hablum minallah* hubungan ibadah kepada Allah SWT. kalau perdata saja maka isteripun tidak ubahnya pelacur. Padahal pernikah adalah ikatan yang suci dan sakral, terhormat.

Menimbang: Drs. Anwar, jika kita mengandaikan ada sebuah kasus yang sama (nafkah batin) tetapi keputusan berbeda itu sudah wajar karena kemampuan seorang hakim berbeda, ibarat ada hakim 4 bisa jawabanya 5 dan walaupun satu peristiwa diputus ditolak dan bisa diterima, pertimbangan hakim dalam putusannya itu dilihat dari, dilatar belakangi kasus yang ditangani hakim



Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat menyerahkan 2/3 gajinya kepada Penggugat setelah perceraian.

Menimbang: bahwa menurut hukum Islam, kewajiban suami yang mentalak isterinya hanyalah sebatas memberikan nafkah, kishwah dan mas kawin selama isterinya menjalani masa *iddah* ditambah *mut'ah*. Oleh karenanya kewajiban suami untuk memberikan bagian gaji kepada bekas isteri, yang di atur dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) PP 10 tahun 1983 jo kewajiban PP 45 tahun 1990 tersebut harus ditafsirkan sebagai kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah di atas, dan oleh karena gugatan nafkah iddah dan mut'ah telah dikabulkan, maka gugatan pembagian gaji dinyatakan ditolak.

Menimbang: bahwa selanjutnya untuk gugat harta bersama sebagaimana tersebut dalam gugat angka 6, 7, dan 8 majelis menilai bahwa gugat tersebut tidak didasarkan pada adanya alasan hak yang jelas, disamping kabur (*obscure libels*), oleh karenanya maka gugat tersebut dinyatakan tidak diterima.

Menimbang: bahwa berdasarkan kepada apa yang telah dipertimbangkan diatas, dengan tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti selainnya, majelis sepakat berpendapat, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian.





pasal 77 ayat (2) dan (5) hanya terdapat kalimat “bantuan lahir batin” yang penafsirannya apabila suami wajib memberi nafkah lahir maka suami juga wajib memberi nafkah batinnya maka isteri dapat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama. Namun, mengenai kompensasi materiil tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun dalam KHI.

Jadi, hakim pengadilan Agama Lumajang menolak gugatan rekonsiliasi mengenai tuntutan nafkah batin tersebut, nafkah batin selain karena tidak dapat diukur kekonkritannya misal kapan suami isteri berhubungan seks dan berapa frekuensinya tidak bisa diukur dan juga tidak ada hukum yang kuat untuk mengabulkannya sebagai pertimbangannya dalam terminologi hukum Islam tidak ditemukan dan masalah nafkah batin isteri merupakan hak sekaligus kewajiban.

Adapun perkara yang dihadapi hakim pengadilan Agama Lumajang sebagaimana perkara nomor :1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj, dengan menggunakan pertimbangan bahwa penderitaan atau kesenangan batin tidak dapat dinilai dengan uang atau diuangkan sebagaimana ketentuan kaidah syar’iyah :

1. Dalam kitab *I’nah al-Talibin* juz III halaman 374 yang berbunyi Artinya : “

*Tidak ada keharusan mengganti wati (hubungan seksual) walau suami lama tidak memberi.”*

2. Dalam kitab *Kifayah al-ahyar* juz II halaman 76 yang berbunyi artinya :

“tidak boleh bagi isteri meminta ganti rugi atas haknya (giliran) baik dari suami maupun dari madunya (selir). Jika isteri tersebut telah mendapat ganti rugi maka ia harus mengembalikannya karena hal-hal tidak menerima ganti







nafkah batin sejatinya merupakan bagian dari kewajiban (umum) suami untuk memberi nafkah kepada isterinya karena tidak dipungkiri seksual bisa menjadi kebutuhan pokok manusia.

Sehingga kenyataan dalam keterangan fikih halnya yang bersifat konkrit yaitu lahir yang dapat dikompensasikan dapat dipenuhi, ini bukan berarti suami melalaikan kewajiban memberi nafkah batin lepas dari tuntutan hukum, isteri dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan Agama untuk menuntut haknya (nafkah batin) disertai dengan cerai gugat (*khuluk*) sesuai apa dari kitab-kitab fikih klasik bahwa bentuk tuntutan itu bukan berupa materi tetapi cerai gugatlah yang harus ditempuh jika memang sudah *dukhul* tetapi seandainya *qabla dukhul* hakim bisa *menfasakh* (membatalkan) pernikahan tersebut . Sebaliknya, jika isteri hanya menuntut batin agar dikompensasikan dengan materiil tanpa cerai gugat, maka dalam hal ini tidak dapat dikabulkan. Karena nafkah batin itu sendiri bersifat abstrak walaupun nanti dikabulkan tidak berupa materi tapi hutang seks itu sendiri karena ini masalah abstrak.

Selaku makhluk sosial, maka dalam masyarakat sebagai manusia yang normal terdapat peraturan pemuasan bagi dorongan naluriah. Misal, ingin makan aturan pemuasannya adalah harus dengan makan, ingin minum aturannya dengan minum, dan lain sebagainya. Adapun pemuasan seksual maka suami atau isteri harus menikah dahulu secara sah, baru keduanya boleh serta halal melakukan hubungan seks.

Dalam Masalah jika suami diberikan ta'zir untuk membayar hutang seks kepada isterinya tidak akan terlaksana karena psikis dari suami tersebut tak akan merespon dengan baik bahkan akan berbahaya dan menimbulkan kejahatan Seks pada isterinya itulah yang dikawatirkan.

Sebagaimana qaidah fiqhiah yang berbunyi artinya :

“apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung : madlarat (resiko), maka hendaknya dipilih salah satu yang tingkat kemadlaratannya lebih ringan”.

Jadi hukuman bagi suami tidak perlu diijtihadkan.

Sebagaimana dalam bidang hubungan seksual dan kemanusiaan, *Mu'asyarah bil Ma'ruf* yang dijalankan oleh suami dan isteri adalah bahwa diantara keduanya harus saling memberi dan menerima, saling mengasihi dan menyayangi, tidak saling menyakiti, tidak saling memperlihatkan kebencian dan masing-masing tidak saling mengabaikan hak dan tanggung jawabnya.

Terhadap masalah hubungan seksual, bahwa seseorang hanya bisa melakukan hubungan seksual apabila ada dorongan syahwat (nafsu.gairah) dan hubungan seks tidak bisa dipaksakan. Jadi, salah satu pihak tidak boleh menuruti gairah sendiri, tetapi harus selaras dengan teman bersetubuh. Artinya, dalam melakukan hubungan seksual suami isteri harus sama-sama bergairah. Bukan hanya suami atau isteri saja tetapi harus keduanya.

Namun, apabila di dalam rumah tangga terjadi putus hubungan seks antara suami isteri sehingga rumah tangga tidak harmonis lagi atau mungkin dari

pertama menikah sudah tidak cocok , maka dalam hal ini perlu diketahui sebab-sebabnya sebagaimana bab III sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak tidak mau atau lalai dalam melaksanakan kewajibannya.
- b. Salah satu pihak merasa sakit hati pada pihak lain karena haknya tidak terpenuhi.
- c. Adanya pihak ketiga.

Berdasarkan sebab-sebab terjadinya putus hubungan seks diatas, yang penulis peroleh sebagian besar isteri tidak mau digauli oleh suaminya dalam pindah tersebut. Sementara itu, pada saat yang sama justru menuntut haknya (nafkah batin) agar dikompensasikan dengan sejumlah uang. Dalam hal ini gugatan isteri tersebut tidak dapat dibenarkan sebagaimana dalam perkara Nomor : 1715/Pdt. G/2006/PA. Lmj., sebab nafkah batin merupakan persoalan hubungan seks, tidak bisa dinilai dengan harta, karena untuk menentukan “harga” nafkah batin sendiri sulit, terlebih nafkah batin tidak bisa diukur baik secara kualitatif (kepuasan) maupun kuantitatif (frekuensi berhubungan seks).

Seandainya nafkah batin itu bisa dikompensasikan dengan materiil, maka kemungkinan yang terjadi para isteri menggunakan haknya untuk menuntut nafkah batin agar dikompnesasikan dengan materiil. Adapun alasan lainnya, apabila nafkah batin bisa dikompensaikan dengan materiil akan menimbulkan kesan amoral yakni tidak jauh beda dengan pelacur demi sesuap nasi, dimana seorang wanita mendapat imbalan uang dari pria atas jasa seksualnya.



Tuntutan kompensasi materiil yang diajukan dalam gugatan tunggal yakni semata-mata menuntut kompensasi materiil atas nafkah batin, sebenarnya tidak ada halangan yuridis untuk mengabulkannya. Hanya saja pertimbangan penolakan gugatan kompensasi materiil atas nafkah batin sejatinya lebih berdasarkan pada aspek etika, bukan pada pertimbangan hukum.

Pada aspek etika inilah letaknya perbedaan paradigma hukum Islam yang menjadi wewenang peradilan Agama dengan hukum barat. Peradilan agama yang mempunyai misi penegakan hukum Islam dengan sendirinya dituntut untuk mengedepankan aspek etika sebagai jati diri dan merupakan ciri keluhuran sekaligus jaminan keabadian hukum Islam. Sebab hukum Islam memang bersumber dari wahyu dari Allah Swt. Yang transenden dan immanen. Ketika penegakan hukum Islam meninggalkan aspek etika, seketika itu pula hukum Islam kehilangan nilai keluhuran dan keabadiannya, sehingga hukum Islam tidak lagi beda dengan hukum barat. Maka Peradilan Agama sebagai institusi sosial yang menegakkan hukum Islam sudah seharusnya menolak gugatan semata-mata menuntut kompensasi materiil atas nafkah batin.



berhubungan seks. Mengenai frekuensi hak isteri dalam hal nafkah batin para ulama berbeda pendapat.

## **B. Saran-saran**

Diharapkan penelitian ini menjadi motivasi bagi instansi terkait untuk lebih meningkatkan pelayanan para pencari keadilan.

Perlu kiranya agar penegak hukum lebih kreatif dalam mencari dan menemukan hukum khususnya yang berkaitan nafkah batin.

Hendaknya dalam membina rumah tangga suami isteri harus mengetahui tugasnya masing-masing demi tercapainya keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.



